

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia, sekitar 89% dari 224 juta penduduknya adalah beragama Islam menurut laporan Biro Pusat Statistik (dalam Zainuri, 2017, hal. 1). Dengan jumlah populasi penduduk mayoritas muslim terbesar tersebut, maka sudah selayaknyalah pemerintah sangat serius menangani kebutuhan akan pengetahuan tentang agama Islam. Di samping itu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan agama untuk kebutuhan individu mereka.

Perkembangan lembaga pendidikan Al-Qur'an yang begitu pesat saat ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah lembaga pendidikan dan siswa yang terus bertambah. Keberadaan lembaga pendidikan Al-Qur'an membawa misi yang sangat mendasar terkait dengan pentingnya memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an sejak dini.

Pada masa penjajahan hampir di semua desa yang penduduknya mayoritas beragama Islam terdapat Madrasah dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. "Di daerah padang misalnya disebut dengan Madras, di daerah sunda disebut dengan Sakola Agama atau Madrasah dan di daerah lainnya yang sejenis dengan Madrasah banyak menggunakan istilah atau penamaan yang berbeda" (Muhlis, 2016 , <http://fkdtkotabandungjuara.org>).

Saat ini pemerintah telah menyediakan lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk mendalami ilmu Agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah baik yang formal, non-formal dan informal. Pemerintah menetapkan hal tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun terkait fungsi pendidikan keagamaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut,

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan / atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabinaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Ketiga jalur pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Terkait dengan pendidikan non formal, maka pemerintah dalam hal ini membentuk suatu wadah pendidikan yang disebut dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). MDT Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3201 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah, menerangkan bahwa “Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan salah satu bentuk pendidikan keagamaan non formal yang telah memberi kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa”. Keberadaannya bukan hanya sebagai pelengkap pendidikan formal, juga mempersiapkan siswa dan membangun bangsa berkarakter Islami dan berwawasan kebangsaan.

Sebagai bentuk usaha serius pemerintah dalam hal pengelolaan Madrasah-Madrasah di seluruh Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah mengupayakan suatu sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan informasi tentang perkembangan sekolah, pondok pesantren maupun perguruan tinggi Islam yang disebut dengan *Education Management Information System* Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (EMIS DIRJENPENDIS). Manfaat EMIS DIRJENPENDIS adalah “Untuk melakukan pendataan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, seperti Pondok Pesantren, Diniyah Takmiliyah, Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ), Pendidikan Diniyah Formal yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren” (Pd-Pontren, 2017 , <http://emispendis.kemenag.go.id>).

Hasil dari pendataan EMIS ini menurut Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama (2018 , <https://kemenag.go.id>) diperoleh bahwa sebanyak 84.566 Madrasah Diniyah Takmiliyah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tercatat ada 489.448 tenaga pengajar, dan 6.000.062 siswa usia pendidikan dasar hingga menengah yang belajar. Sedangkan hasil pendataan khusus di wilayah Kota Bandung apabila dikhususkan kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah

(MDTA) yang kedudukannya setingkat jenjang pendidikan SD, terdapat sebanyak 1.134 MDTA dan sebanyak 6.201 guru yang mengajar serta 75.264 siswa yang tersebar di 30 kecamatan. Demikian menurut Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Kondisi ideal Madrasah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3201 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Diniyah Takmiliyah, bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah seharusnya mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam melayani masyarakat melalui Pendidikan MDTA, Kementerian Agama Kabupaten/Kota bersama pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab untuk memastikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap MDTA tersedia satu orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D IV dan atau pendidikan pesantren yang mencapai 30%, di setiap Kabupaten/kota
- b. Setiap Kabupaten/Kota, semua kepala MDTA berkualifikasi akademik S1/D IV dan atau pendidikan pesantren
- c. Semua pengawas MDTA memiliki kualifikasi akademik S1 dan atau pendidikan pesantren, kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali dalam satu bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama dua jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
- d. Kementerian Agama dan pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

Satuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah juga mempunyai tanggung jawab berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3201 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai berikut :

- a. Setiap MDTA menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Kementerian Agama bagi setiap peserta didik,
- b. Menyediakan alat peraga yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum
- c. Menerapkan kurikulum yang sesuai dengan Standar Isi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama
- d. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampu,

- e. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar siswa
- f. Kepala MDTA melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru sebanyak dua kali dalam setiap semester.

Perubahan paradigma baru dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah pada era ini, mengubah anggapan sebelumnya yang hanya sebagai pengajian biasa untuk mengisi waktu luang anak-anak di rumah setelah pulang sekolah. Madrasah Diniyah harus tetap eksis walaupun dengan format baru dimana Madrasah Diniyah Takmiliah merupakan penunjang pembelajaran materi-materi Agama Islam yang diajarkan pada sekolah formal. Harapan orang tua agar anak-anak mereka dapat menguasai ilmu agama sangat besar, sehingga Pendidikan Diniyah menjadi tumpuan harapan terhadap pengembangan ilmu agama untuk anak-anak mereka. Dengan kondisi ini eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah di lingkungan di mana mereka berada menjadi penting keberadaannya. Antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan Madrasah Diniyah yang sangat luar biasa ini, sayangnya belum diimbangi dengan pengelolaan Madrasah Diniyah yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

Pemerintah dalam hal ini masih terfokus dan memprioritaskan pendidikan formal dibandingkan dengan pendidikan non formal. Masalah-masalah yang muncul di Madrasah Diniyah Kota Bandung yang berjumlah 1.134 unit dan tersebar di 30 kecamatan ini masih belum tersentuh kebijakan pemerintah Kota Bandung secara merata, baik dari sisi bantuan bangunan, biaya operasional maupun manajemen pengelolaannya (Muhlis, 2016, <http://fkdtkotabandungjuara.org>), sehingga fakta yang ditemukan di lapangan adalah banyak Madrasah Diniyah yang masih menggunakan Masjid dan rumah-rumah pribadi sebagai tempat belajar, di samping tidak memiliki buku dan alat sumber belajar, kondisi bangunan juga banyak yang sudah mengkhawatirkan. Hal penting lainnya juga bahwa Madrasah tidak sanggup membayar honor pengajar.

Guru-guru yang mengajar di Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah memiliki latar belakang kualifikasi akademik yang sangat bervariasi, mulai dari lulusan SMP sampai yang sudah bergelar Magister (S2), dengan kondisi tersebut tentunya menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya yaitu penguasaan

konsep mengajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran menjadi tidak seimbang, keterbatasan pemahaman kurikulum dan tujuan pembelajaran, serta profesionalisme yang masih jauh dari harapan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru-guru yang mengabdikan diri di MDTA, bahkan sudah ada yang berpuluh-puluh tahun, namun tingkat penghargaan kepada mereka masih sangat minim, banyak guru yang diberi honor mengajar tidak sesuai dengan beban mengajar dan bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali.

Upaya meningkatkan penguasaan ilmu agama untuk selanjutnya diterapkan dalam bentuk akhlakul karimah, tentu perlu adanya dukungan dari semua pihak, termasuk lembaga pendidikan. Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dirasakan masih kurang. Karena hanya tiga jam pelajaran per minggu, maka pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah menjadi alternatif yang cukup efektif, tetapi timbul beberapa permasalahan di lapangan, yaitu perhatian orang tua terhadap pembelajaran di Madrasah Diniyah masih kurang. Sebagian besar orang tua belum bisa membagi waktu antara kegiatan pembelajaran di sekolah formal dengan kegiatan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliah, sehingga banyak siswa yang keluar dari Madrasah Diniyah Takmiliah pada usia kelas 6 SD atau tingkat SMP dikarenakan jadwal sekolah formal yang padat.

Pergeseran pendekatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia telah berimbas pada pengelolaan sistem pendidikan, yaitu dari yang semula bersifat sentralistik bergeser ke arah pengelolaan yang bersifat desentralistik. Menurut Akhwan (2008, hal. 48) manajemen desentralisasi memberi keuntungan pada Madrasah untuk melaksanakan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan kebutuhan yang dikondisikan untuk kebutuhan lokal.

Luasnya wilayah Indonesia beserta masalah-masalah yang dihadapi telah mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan potensi daerah dan kendalanya dalam perencanaan. Standarisasi dan penyeragaman rencana yang terlalu terpusat dirasakan menghambat pelaksanaan pembangunan karena cenderung akan berakibat pada ketidaksesuaian antara rencana dari pusat dan kebutuhan di daerah masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah diberlakukan otonomi daerah bidang pendidikan dan

kebudayaan. Menurut Muhaimin (2008, hal. 1) Visi pokok dari otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu “Upaya pemberdayaan terhadap masyarakat setempat untuk menentukan sendiri jenis dan muatan kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem penilaian hasil belajar, guru dan kepala sekolah, fasilitas dan sarana belajar untuk putra putri mereka”.

Keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang tujuannya untuk melengkapi Pendidikan Agama Islam di sekolah formal, berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan terdapat beberapa ketimpangan dalam hal-hal berikut, yaitu :

- a. Dari Pihak Pemerintah belum secara maksimal mengupayakan pembinaan peningkatan kompetensi guru, salah satu kendalanya terkait pendanaan.
- b. Belum terealisasinya kerjasama Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan sekolah formal dalam wujud kerjasama terkait penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang terintegrasi dengan pendidikan Agama di sekolah.
- c. Minimnya upaya pemberdayaan guru di tingkat Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang memiliki latar belakang kualifikasi akademik yang bervariasi, serta minimnya dana dalam pengembangan potensi guru, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.
- d. Belum adanya kerjasama yang terpadu antara Madrasah Diniyah Takmiliyah dengan sekolah formal terkait pembagian waktu antara kegiatan belajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah formal.
- e. Kurangnya perhatian orang tua dalam mendukung pendidikan ilmu Agama Islam di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, pada umumnya mereka lebih berkonsentrasi pada pendidikan sekolah formal.

Hasil temuan awal peneliti di atas menggambarkan bahwa, permasalahan tersebut sangat berpengaruh bagi implementasi kurikulum di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang sedang diupayakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Oleh sebab itu perlu adanya perbaikan dari kondisi sekarang kepada kondisi yang lebih baik dengan melakukan beberapa perbaikan yang melibatkan semua aspek pendukung bagi implementasi kurikulum tersebut dan

memperkecil hambatan-hambatan. Upaya yang serius dari Pemerintah dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam di Madrasah Diniyah Takmiliyah serta kerjasama dengan instansi Sekolah formal, serta sosialisasi hal tersebut kepada pihak-pihak yang terkait merupakan satu hal yang penting untuk dilaksanakan.

Ditinjau dari sisi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah maka peranan Madrasah Diniyah dalam upaya memberdayakan dirinya perlu dimunculkan dikarenakan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah merupakan ujung tombak dan pelaku utama bagi implementasi kurikulum. Dilain pihak kesadaran orang tua akan pentingnya keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah bagi pengembangan agama putra-putrinya masih harus terus diupayakan.

Hal di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk berusaha mengkaji lebih dalam tentang sejauh mana implementasi kurikulum dapat diterapkan di Madrasah-Madrasah Diniyah Takmiliyah, apa saja faktor pendukung dan hambatan-hambatannya serta usulan dan solusi apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga hasil akhir dari penelitian ini menjadi masukan bagi pengambil keputusan untuk melakukan langkah-langkah terkoordinir dan terencana serta tepat sasaran sehingga implementasi kurikulum di Madrasah-Madrasah Takmiliyah Awaliyah dapat segera terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini secara umum dirumuskan dalam pertanyaan : “Bagaimana Implementasi Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kota Bandung?”

Implementasi kurikulum dalam hal ini dibatasi pada hal yang terkait dengan proses pembelajaran yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan sehingga berdasarkan batasan masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dijabarkan menjadi rumusan pertanyaan secara khusus dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kota Bandung ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kota Bandung ?

3. Bagaimana Penilaian pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kota Bandung ?
4. Bagaimana Pengawasan pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kota Bandung ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kota Bandung. Dengan tujuan tersebut, maka penelitian ini secara khusus diarahkan pada konsep kurikulum yang masih bersifat tertulis yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dapat diaktualisasikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah melalui pengetahuan tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Menelaah perencanaan pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kota Bandung
2. Menelaah pelaksanaan pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kota Bandung
3. Menelaah penilaian pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kota Bandung
4. Menelaah pengawasan dalam Implementasi Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kota Bandung

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritik maupun praktik dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritik**

Manfaat teoritik dari penelitian ini adalah bahwa semua proses kegiatan pembelajaran yang ada dalam penelitian ini terkait perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pembelajaran, semuanya merujuk kepada teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan yang valid dalam mengembangkan wawasan terkait implementasi kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.

## 2. Manfaat Praktik

Manfaat praktik dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dalam hal ini Kepala Sekolah dan Guru, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan dalam implementasi kurikulum yang sesuai untuk lembaga pendidikannya.
- b. Bagi pengembang kurikulum, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam mengembangkan model implementasi kurikulum khususnya di tingkat Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah
- c. Bagi Kementerian Agama khususnya bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam rangka menyusun atau menyempurnakan pengembangan implementasi kurikulum yang diterapkan di tingkat Madrasah Diniyah khususnya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.

### 1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan tepat serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dari beberapa istilah yang berkenaan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### a. Implementasi kurikulum

Implementasi kurikulum menurut Rusman (2009, hal. 74) adalah “Bentuk aktualisasi dari kurikulum yang telah direncanakan melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru bersama siswa untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan.” Sedangkan menurut Hamalik (2010, hal. 123) implementasi kurikulum yaitu operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat tertulis menjadi aktual ke dalam kegiatan pembelajaran”.

Implementasi kurikulum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengarah pada implementasi yang diterapkan pada proses kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengawasan pembelajaran yang dilakukan melalui interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.

Miranti Oktafiani, 2019

*IMPLEMENTASI KURIKULUM MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH DI KOTA BANDUNG*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA)**

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2347 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah “Satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa SD/MI sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat”.

Madrasah Diniyah yang dijadikan sebagai sasaran penelitian ini adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sebagai Madrasah Diniyah Unggulan. Madrasah Diniyah Unggulan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3202 Tahun 2013 tentang Panduan Pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah Unggulan yaitu “Lembaga pendidikan Islam yang memiliki komponen unggul, yang tercermin pada sumber daya manusia (pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa), sarana dan prasarana, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terampil, yang tentu dengan kekokohan spiritual (Iman, Islam, dan Ihsan) dan berkepribadian akhlak mulia”.

**1.6 Struktur Organisasi Tesis**

Upaya untuk memudahkan dalam pemahaman penelitian ini maka penulisan tesis ini disusun sebagaimana sistematika sebagai berikut :

**BAB I berisi :** Pendahuluan, yaitu meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis.

**BAB II berisi :** Kajian Pustaka, yaitu konsep yang berhubungan dengan judul dan permasalahan, kerangka berfikir, dan penelitian yang relevan.

**BAB III berisi :** Metode Penelitian, yang meliputi desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data.

**BAB IV berisi :** Temuan dan Pembahasan, yaitu meliputi penjabaran dan lokasi objektif penelitian, temuan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V berisi :** Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, yakni menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, serta mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.